

## **Tax Avoidance Berbasis Laba Operasi dan Total Laba Comprehensive: Bukti Dari Asia Tenggara**

**Hanifah Puspita Sari<sup>1</sup>, Marhaendra Kusuma<sup>2\*</sup>**

<sup>1</sup>Prodi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Malang

<sup>2</sup>Prodi S1 Akuntansi, Universitas Islam Kediri

**E-mail:** <sup>1</sup>hanifah.puspita@polinema.ac.id, <sup>2\*</sup>marhaenis@uniska-kediri.ac.id

Diterima: 14 Maret 2026

Direvisi: 27 April 2026

Disetujui: 26 Mei 2026

### **ABSTRACT**

*This study aims to investigate the effect of dividend payment pressure and corporate governance on tax avoidance in publicly listed companies in Southeast Asia. The data were collected from the financial statements of 3,835 companies listed in Southeast Asia during 2019–2025, including the Philippines (PSE), Singapore (SGX), Thailand (SET), Indonesia (IDX), and Malaysia (MYX), sourced from the Bloomberg Database. After excluding loss-making companies and those that did not regularly publish financial statements, the final sample consisted of 1,392 firm-years. Data were analyzed using multiple linear regression. Drawing on agency theory, the fraud triangle theory, and signaling theory, the study finds that dividend payment pressure increases tax avoidance, while strong corporate governance constrains it, with results remaining consistent in robustness tests and 2SLS endogeneity checks. The originality of this research lies in the measurement of tax avoidance, which is modified using effective tax rates based on operating income (ETR-OI) and comprehensive income (ETR-CI). This study provides a more precise measurement of tax avoidance and offers new empirical evidence from Southeast Asian companies.*

**Keywords:** *Effective Tax Rate, Operating Income, Comprehensive Income, Tax Avoidance, Southeast Asia*

### **PENDAHULUAN**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan PSAK No 118 tentang penyajian laporan keuangan yang akan berlaku efektif per 1 Januari 2027 mendatang, dimana PSAK ini merupakan hasil konvergensi dengan IFRS 118. Salah satu perubahan mendasar dari PSAK 118 adalah kewajiban penyajian subtotal laba, salah satunya adalah laba operasi. Kewajiban

penyajian sub total laba operasi ini dalam rangka meningkatkan relevansi nilai dan kebermanfaatannya informasi bagi pengguna, khususnya memudahkan pengguna mengidentifikasi unsur yang membentuk laba akhir dengan menyajikan khusus laba operasi yang memang berasal dari aktivitas operasional utama perusahaan (Kusuma, Putranti, et al., 2025). Penyajian subtotal ini juga memudahkan pengguna mengetahui sumber penerimaan utama laba akhir, mengingat potensi bias apabila kondisi laba non operasional lebih tinggi proporsinya daripada laba operasional (Ratih et al., 2025).

Laba operasional adalah laba yang sering tersaji setiap periode dan relatif paling besar proporsinya dalam membentuk laba bersih akhir, karena unsur pembentuknya berasal dari aktivitas operasional utama, sehingga banyak terdapat transaksi-transaksi pendapatan kena pajak. Tax avoidance tertinggi berasal dari pendapatan kena pajak yang berasal dari aktivitas operasional utama (Athira & Ramesh, 2023). Namun sayangnya riset selama ini, pertama, dalam mengkaji tax avoidance menggunakan proksi pengukur *Effective Tax Rate* (ETR) yang dalam perhitungannya hanya menggunakan laba bersih sebelum pajak yang didalamnya masih menjadi satu antara laba dari aktivitas operasional utama dengan laba non operasi (Wongsinhirun et al., 2024). Padahal, proporsi terbanyak dalam menyumbang pendapatan kena pajak perusahaan adalah pendapatan dan beban operasi yang sejalan dengan aktivitas utama bisnis perusahaan (Arisyahidin et al., 2025b). Kedua, riset selama ini dalam mengkaji tax avoidance juga hanya mengukur penghindaran pajak atas laba bersih (Jiang et al., 2023). Padahal, selain laba bersih sebagai pendapatan dan beban nyata terealisasi, di dalam laporan laba rugi juga ada penghasilan komprehensif lainnya, yang didalamnya juga ada pajak atas OCI yang selanjutnya akan mempengaruhi penyajian total laba komprehensif (Kusuma, Zuhroh, et al., 2021). OCI dapat digunakan untuk penghindaran pajak, melalui realisasi dini, penundaan realisasi, penambahan dan pengurangan jumlah realisasi aset yang akan berdampak pada keuntungan pelepasan aset sebagai bagian dari laba kena pajak (Kusuma dan Rahayu, 2022).

Kebaruan dalam studi kami ini ada tiga hal. *Pertama*, modifikasi rumus ETR hanya melibatkan laba operasi, sebagai faktor paling dominan dalam menyumbang penghasilan kena pajak. Selanjutnya kami sebut modifikasi rumus ETR ini dengan *effective tax rate base operating income* (ETR-OI). *Kedua*, modifikasi rumus ETR yang melibatkan total comprehensive income karena di dalamnya juga ada pajak atas OCI yang mempengaruhi total beban pajak korporat dalam satu periode. Selanjutnya kami sebut modifikasi rumus ETR ini dengan *effective tax rate base comprehensive income* (ETR-CI). *Ketiga*, menguji determinasi ETR OI dan ETR CI berlandaskan teori triangle fraud dan teori agensi, apakah adanya tekanan dan adanya kesempatan menstimulus manajemen melakukan tindakan ETR OI dan ETR CI. Sepengetahuan kami, belum banyak studi yang spesifik mengkaji penghindaran pajak atas laba operasi dan total laba komprehensif, terlebih dengan objek studi di negara Asia Tenggara yang telah lama telah mengadopsi IFRS dalam standar akuntansi keuangannya (Santyo Rusandy & Kusuma, 2026).

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa kontribusi penting bagi berbagai pemangku kepentingan. Dalam perspektif akademik, studi ini memperkaya literatur mengenai pengukuran tax avoidance dengan menawarkan pendekatan alternatif melalui modifikasi *effective tax rate* berbasis laba operasi (ETR-OI) dan total laba komprehensif (ETR-CI), yang berpotensi memberikan gambaran yang lebih spesifik

mengenai perilaku penghindaran pajak perusahaan dibandingkan pengukuran konvensional berbasis laba sebelum pajak. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang pengembangan kajian empiris mengenai hubungan antara struktur laba dalam laporan keuangan dan strategi perpajakan korporasi, khususnya dalam konteks negara-negara Asia Tenggara yang telah mengadopsi standar akuntansi berbasis IFRS.

Hasil penelitian Kusuma et al., (2026) dan (Arisyahidin et al., 2026) membuktikan bahwa penerapan akuntansi nilai wajar sebagai dampak penggunaan IFRS dapat meminimalisir celah *creative accounting*. Bagi pemerintah, khususnya otoritas perpajakan, temuan penelitian ini dapat memberikan perspektif baru dalam mengidentifikasi potensi penghindaran pajak yang bersumber dari aktivitas operasional maupun dari komponen penghasilan komprehensif lainnya, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan pengawasan dan perumusan regulasi perpajakan yang lebih efektif. Bagi manajemen korporat, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana struktur pelaporan laba—baik laba operasi maupun total laba komprehensif—dapat memengaruhi persepsi pemangku kepentingan terhadap praktik perpajakan perusahaan, sehingga dapat mendorong praktik pengelolaan pajak yang lebih transparan dan akuntabel. Sementara itu, bagi dewan penyusun standar akuntansi keuangan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan empiris mengenai relevansi informasi laba operasi dan total laba komprehensif dalam analisis perilaku perpajakan perusahaan, khususnya dalam konteks implementasi standar baru terkait penyajian laporan keuangan, sehingga dapat mendukung pengembangan standar yang semakin meningkatkan kualitas, transparansi, dan kegunaan informasi laporan keuangan bagi para penggunanya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Agency Theory*

Teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen dalam organisasi. Prinsipal sebagai pemilik sumber daya mendelegasikan wewenang pengelolaan perusahaan kepada agen, yaitu manajemen, untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan. Namun, dalam praktiknya hubungan ini seringkali diwarnai oleh konflik kepentingan karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda (Kusuma et al., 2022). Manajemen sebagai agen cenderung memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi internal perusahaan dibandingkan dengan prinsipal, sehingga menciptakan asimetri informasi (Kusumaningarti, Kusuma, Ahamad, et al., 2025). Kondisi ini memberikan ruang bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemilik maupun pemangku kepentingan lainnya (Agustin et al., 2025). Dalam konteks perpajakan perusahaan, teori agensi menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik perusahaan maupun pemerintah sebagai otoritas pajak dapat mendorong munculnya praktik *tax avoidance* (Wahyudi et al., 2024).

Manajemen memiliki insentif untuk meminimalkan beban pajak perusahaan guna meningkatkan laba setelah pajak yang pada akhirnya dapat memengaruhi penilaian kinerja manajerial maupun kompensasi yang diterima. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan pemilik dan otoritas eksternal dalam memonitor seluruh aktivitas perusahaan membuka peluang bagi manajemen untuk memanfaatkan celah

regulasi dan fleksibilitas dalam pelaporan keuangan (Athori & Kusuma, 2023). Oleh karena itu, efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan, seperti peran dewan komisaris, komisaris independen, serta sistem pengendalian internal dan pengawasan eksternal, menjadi faktor penting dalam mengurangi konflik keagenan dan membatasi perilaku oportunistik manajemen dalam melakukan praktik tax avoidance (Kusuma & Rahayu, 2022).

*Agency theory* menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan dan manajemen yang diberi mandat untuk mengelola sumber daya perusahaan. Dalam hubungan ini sering muncul konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan antara kedua pihak serta adanya asimetri informasi (Kusuma & Athori, 2023). Manajemen memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi operasional dan keuangan dibandingkan pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah sebagai otoritas pajak (Wahyudi et al., 2025). Kondisi tersebut dapat membuka peluang bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingannya sendiri, termasuk dalam strategi pengelolaan pajak perusahaan (Kusuma, 2024). Dalam konteks perpajakan, manajemen dapat memanfaatkan fleksibilitas dalam standar akuntansi dan regulasi perpajakan untuk menurunkan beban pajak secara legal melalui praktik tax avoidance. Apabila mekanisme pengawasan tidak berjalan efektif, seperti lemahnya fungsi dewan komisaris, komisaris independen, maupun audit internal, maka potensi tindakan penghindaran pajak oleh manajemen akan semakin besar (Kusumaningarti, Kusuma, & Athori, 2025).

### ***Triangle Fraud Theory***

Teori segitiga kecurangan (Cressey, 1953) menjelaskan bahwa tindakan kecurangan dalam organisasi umumnya dipicu oleh tiga elemen utama, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). *Opportunity*, lemahnya penerapan prinsip2 tata kelola, khususnya tidak berjalan efektif fungsi pengawasan dewan komisaris, membuka kesempatan terjadinya tax avoidance oleh dewan direksi. *Rasionalisasi*, tuntutan pembayaran dividen dari shareholders dan lolosnya praktik tax avoidance dari SPI dan dewan komisaris, merasionalisasi pemikiran manajemen utk melakukan tax avoidance. Tekanan muncul ketika individu atau manajemen menghadapi tuntutan tertentu yang mendorong mereka untuk mencapai target kinerja tertentu, seperti ekspektasi pemegang saham terhadap tingkat laba dan pembagian dividen yang stabil (Kusuma, 2023a). Dalam konteks perusahaan, tekanan tersebut dapat mendorong manajemen untuk mempertahankan tingkat profitabilitas tertentu, sehingga muncul dorongan untuk meminimalkan beban pajak guna menjaga laba setelah pajak tetap tinggi (Kusuma & Luayyi, 2024). Dengan demikian, praktik tax avoidance dapat dipandang sebagai salah satu respon manajemen terhadap tekanan ekonomi dan kinerja yang dihadapi dalam pengelolaan perusahaan (Supheni et al., 2026). *Pressure*, tekanan dari shareholders tentang tuntutan membayarkan dividen rutin setiap tahun dalam jumlah yang besar, menstimulus manajemen melakukan tax avoidance.

Selain tekanan, kesempatan juga menjadi faktor penting yang memungkinkan terjadinya tax avoidance. Kesempatan muncul ketika terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal, mekanisme tata kelola perusahaan, maupun pengawasan eksternal dari regulator dan otoritas pajak. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi

manajemen untuk memanfaatkan fleksibilitas dalam standar akuntansi maupun celah dalam regulasi perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak (Agustin & Kusuma, 2024). Di sisi lain, rasionalisasi berperan sebagai proses pembenaran yang dilakukan oleh pelaku untuk meyakinkan dirinya bahwa tindakan yang dilakukan masih dapat diterima atau tidak melanggar norma secara langsung.

Dalam praktiknya, manajemen dapat merasionalisasi tax avoidance sebagai strategi efisiensi pajak yang sah atau sebagai upaya optimalisasi kinerja perusahaan bagi pemegang saham (Hasan et al., 2024). Kombinasi antara tekanan untuk mencapai kinerja tertentu, kesempatan akibat lemahnya pengawasan, serta rasionalisasi atas tindakan tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan probabilitas terjadinya praktik tax avoidance dalam perusahaan (Dhawan et al., 2020). Dalam konteks pelaporan keuangan dan perpajakan perusahaan, tekanan dapat muncul dari tuntutan pemegang saham terhadap kinerja keuangan yang tinggi atau pembayaran dividen yang stabil. Kesempatan dapat timbul ketika sistem pengendalian internal tidak berjalan efektif atau pengawasan eksternal relatif lemah. Sementara itu, rasionalisasi muncul ketika pelaku meyakini bahwa tindakan yang dilakukan masih dapat dibenarkan, misalnya dengan alasan efisiensi pajak atau optimalisasi nilai perusahaan. Ketiga kondisi tersebut dapat mendorong manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak melalui berbagai teknik pengelolaan laba maupun rekayasa akuntansi yang masih berada dalam batas legalitas (Gu & Wang, 2023).

### ***Signaling Theory***

Teori pensinyalan (Spence, 1973) menjelaskan bahwa dalam kondisi asimetri informasi antara manajemen dan pihak eksternal, perusahaan memiliki insentif untuk menyampaikan informasi mengenai prospek dan kinerja perusahaan melalui berbagai sinyal kepada pasar. Manajemen sebagai pihak yang memiliki informasi internal yang lebih lengkap berupaya mengirimkan sinyal yang dapat meningkatkan persepsi positif investor terhadap kondisi perusahaan (Anam et al., 2025). Sinyal tersebut dapat disampaikan melalui berbagai kebijakan dan informasi keuangan, seperti pengungkapan laporan keuangan, stabilitas laba, maupun kebijakan dividen (Kusuma & Agustin, 2023). Dalam konteks pasar modal, pembayaran dividen yang stabil dan berkelanjutan sering dipersepsikan oleh investor sebagai indikator bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik, arus kas yang memadai, serta prospek usaha yang positif di masa depan (Andriana et al., 2025).

Dalam perspektif teori pensinyalan, upaya perusahaan untuk mempertahankan citra positif di mata investor dapat memengaruhi berbagai keputusan keuangan yang diambil oleh manajemen (Kusuma & Kusumaningarti, 2023), termasuk kebijakan perpajakan (Abdelfattah & Aboud, 2020). Manajemen memiliki kepentingan untuk mempertahankan reputasi perusahaan sebagai entitas yang mampu memberikan pengembalian yang stabil kepada pemegang saham melalui pembayaran dividen secara rutin (Marjukah et al., 2025). Untuk mendukung kemampuan tersebut, manajemen dapat berupaya meningkatkan ketersediaan kas perusahaan dengan menekan beban pajak melalui strategi tax avoidance yang masih berada dalam batas ketentuan regulasi (Lv 2025). Dengan demikian, praktik tax avoidance dalam kerangka teori pensinyalan dapat dipandang sebagai salah satu strategi yang digunakan manajemen untuk mempertahankan sinyal positif kepada pasar mengenai stabilitas kinerja dan

kemampuan perusahaan dalam memenuhi ekspektasi pemegang saham terhadap pembagian dividen (Jing et al 2025). Laba operasi merupakan sinyal positif bagi stakeholders tentang capaian kinerja manajemen dalam mengoptimalkan pendapatan dari aktivitas operasional dan efisiensi beban operasional, dimana pendapatan dan beban operasional merupakan aktivitas utama perusahaan yang merepresentasikan kinerja utama, bukan aktivitas sampingan atau non operasi. Capaian laba operasi merupakan sinyal bahwa kinerja keuangan khususnya profitabilitas dapat tercapai optimal yang merepresentasikan kemampuan memenuhi ekspektasi return investor dimasa mendatang.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Tekanan Terhadap Tax Avoidance**

Tekanan untuk membayar dividen yang stabil atau meningkat setiap periode dapat menjadi faktor yang memotivasi manajemen untuk melakukan tax avoidance (Khadn et al., 2017). Ketika perusahaan menghadapi keterbatasan sumber daya kas, manajemen harus menyeimbangkan antara kewajiban pembayaran pajak kepada pemerintah dan ekspektasi pemegang saham terhadap distribusi dividen (Kusuma, Marjukah, et al., 2025). Dalam situasi ini, manajemen dapat terdorong untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan melalui berbagai strategi perencanaan pajak. Upaya tersebut bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan kas sehingga perusahaan tetap mampu membayar dividen sesuai harapan investor tanpa mengganggu stabilitas keuangan perusahaan (Xiang et al., 2025). Dari perspektif teori segitiga kecurangan dan teori pensinyalan, tekanan dividen dapat dipandang sebagai bentuk stimulus yang mendorong manajemen untuk melakukan pengelolaan pajak secara agresif. Dividen yang stabil sering dijadikan indikator keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan, sehingga kegagalan mempertahankan kebijakan dividen dapat menimbulkan persepsi negatif di pasar (Degl'Innocenti et al., 2022). Dalam kondisi demikian, manajemen dapat memanfaatkan fleksibilitas dalam pelaporan akuntansi maupun kebijakan perpajakan untuk menekan beban pajak efektif perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi tekanan pembayaran dividen, semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan praktik tax avoidance yang tercermin dalam penurunan effective tax rate (Kerr et al., 2024).

H1: Tekanan pembayaran dividen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan pengukuran ETR-IO dan ETR-CI.

#### **Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance**

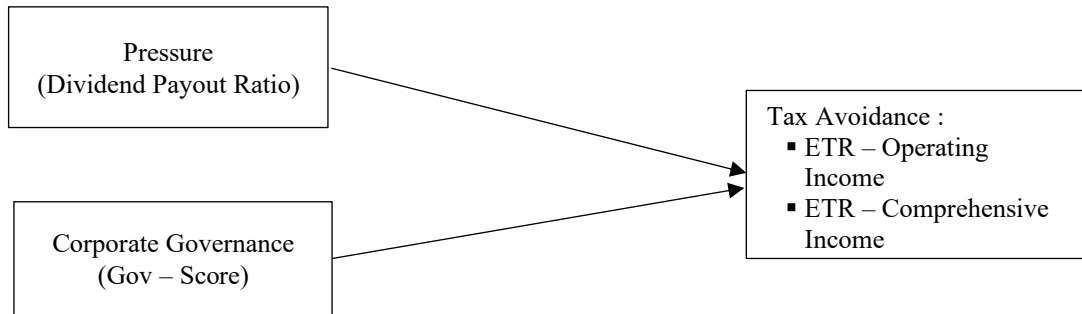
Corporate governance berperan sebagai mekanisme pengawasan yang dirancang untuk memastikan bahwa manajemen menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Song & Holland, 2023). Mekanisme tata kelola yang baik, seperti keberadaan dewan komisaris independen, komite audit yang efektif, serta sistem pengendalian internal yang kuat, dapat mengurangi potensi perilaku oportunistik manajemen (Nerantzidis et al., 2024). Dalam konteks perpajakan, mekanisme pengawasan tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan pajak perusahaan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Putranti et al., 2025). Berdasarkan perspektif teori agensi, penerapan corporate governance yang efektif dapat mengurangi asimetri

informasi dan membatasi ruang gerak manajemen dalam melakukan tindakan yang merugikan pemangku kepentingan (Kusuma & Agustin, 2024). Pengawasan yang kuat dari dewan komisaris, auditor internal, maupun auditor eksternal dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta mengurangi kemungkinan manipulasi yang berkaitan dengan pengelolaan beban pajak (Kusuma, Assih, et al., 2021). Dengan demikian, semakin baik kualitas tata kelola perusahaan, semakin kecil kemungkinan manajemen melakukan tax avoidance yang tercermin dalam nilai effective tax rate perusahaan (Vito, 2024).

H2: Corporate governance berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dengan pengukuran ETR-IO dan ETR-CI.

*Agency theory* (Jensen & Meckling, 1976) menyatakan bahwa adanya gap kepentingan dan gap informasi antara manajemen dengan stakeholders lainnya (pemerintah dan calon investor) membuka kesempatan bagi manajemen untuk melakukan tindakan tax avoidance, apalagi jika prinsip-prinsip tata kelola yang baik tidak berjalan efektif, seperti lemahnya pengawasan dari dewan komisaris, komisaris independen, tidak efektifnya audit internal dan lemahnya profesionalisme aparat pajak (Kusuma, 2023b). *Triangle fraud theory* (Cressey, 1953) menyatakan bahwa tiga dimensi teori segitiga kecurangan, tax avoidance timbul karena adanya 1) stimulus dari pemegang saham akan pembayaran dividen yang optimal dan rutin, 2) kesempatan dari lemahnya pengawasan internal dan eksternal, dan 3) rasionalisasi tentang determinasi terjadinya tax avoidance. Tax avoidance secara konsep termasuk bentuk kecurangan karena menyajikan informasi beban pajak dan pembayarannya yang mungkin mengandung informasi dan perhitungan yang berasal dari tindakan creative accounting.

*Signalling theory* (Spence, 1973) menyatakan bahwa pembayaran dividen yang rutin merupakan sinyal perusahaan berkinerja baik dan berkomitmen tinggi untuk membayar dividen, sehingga memberi jaminan keamanan berinvestasi bagi calon investor. Agar mampu membayar dividen pada jumlah dan frekuensi yang diharapkan pemegang saham, memacu manajemen melakukan tax avoidance, daripada kas untuk membayar pajak, lebih baik digunakan untuk membayar dividen (Gao et al., 2025). Berdasarkan uraian teoritis tersebut, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara tekanan pembayaran dividen, corporate governance, dan praktik penghindaran pajak perusahaan. Tekanan pembayaran dividen dipandang sebagai faktor yang dapat mendorong manajemen untuk menekan beban pajak perusahaan, sedangkan corporate governance berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dapat membatasi tindakan tersebut (Tang, 2020). Praktik penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan dua pendekatan, yaitu effective tax rate berbasis laba operasi (ETR-OI) dan effective tax rate berbasis total comprehensive income (ETR-CI). Kedua ukuran ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perilaku tax avoidance perusahaan, baik yang berasal dari aktivitas operasional maupun dari komponen penghasilan komprehensif lainnya.



**Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian**

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengambil data dari laporan keuangan 3.835 perusahaan yang terdaftar di masing-masing pasar modal terbesar di negara wilayah Asia Tenggara periode tahun 2019 – 2025, yaitu : Filipina (PSE), Singapura (SGX), Thailand (SET), Indonesia (IDX) dan Malaysia (MYX). Data berasal dari Bloomberg Database. Kami menggunakan data Asia Tenggara karena pasar wilayah ini termasuk representasi pasar negara berkembang dan telah mengadopsi standar keuangan IFRS dalam pelaporan keuangannya, sehingga relevan dengan tujuan penelitian ini. Kami tidak memasukkan laporan keuangan yang mengalami kerugian karena tidak membayar pajak, dan kami juga tidak memasukkan data yang tidak rutin menerbitkan laporan keuangan selama periode penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, data observasi dalam penelitian ini sebanyak 1.392 firm-years.

**Tabel 1. Data Penelitian**

Keterangan	IDX	MYX	SET	SGX	PSE	Jumlah
Populasi terdaftar periode 2019-2025	911	1012	871	784	257	3.835
Dikurangi :						
Data tidak rutin tersedia 2019-2025	453	242	265	336	92	
Mengalami rugi (laba negatif)	182	343	312	172	46	
Data firm-years	276	427	294	276	119	1.392

Sumber: Data diolah dari Bloomberg Database, 2026.

Variabel penelitian dan pengukurannya tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 2. Variabel Penelitian dan Pengukuran**

Variable	Deskripsi	Pengukuran	Referensi
<b>Dependent Variable</b>			
Tax Avoidance	Tarif pajak efektif berdasarkan laba operasional (ETR OI). Beban pajak perusahaan dibagi dengan laba operasional untuk tahun t perusahaan i.	Tarif pajak efektif berdasarkan laba operasional (ETR OI). Beban pajak perusahaan dibagi dengan laba operasional untuk tahun t perusahaan i.	(Dyreg et al., 2017)

	Tarif pajak efektif berdasarkan laba komprehensif (ETR CI). Beban pajak perusahaan dibagi dengan laba komprehensif untuk tahun t perusahaan i.	Tarif pajak efektif berdasarkan laba komprehensif (ETR CI). Beban pajak perusahaan dibagi dengan laba komprehensif untuk tahun t perusahaan i.	(Dyrenge et al., 2017)
<b>Independent Variable</b>			
Stimulus-Pressure	Tekanan dari pemegang saham untuk secara rutin membayar dividen mendorong terjadinya penghindaran pajak (DPR). Rasio pembayaran dividen: total pembayaran dividen dibagi dengan laba bersih perusahaan i pada tahun t.	Tekanan dari pemegang saham untuk secara rutin membayar dividen mendorong terjadinya penghindaran pajak (DPR). Rasio pembayaran dividen: total pembayaran dividen dibagi dengan laba bersih perusahaan i pada tahun t.	(Arisyahidin et al., 2025a)
Opportunity	Penerapan tata kelola yang baik mengurangi peluang manajemen untuk terlibat dalam penghindaran pajak (Skor tata kelola). Skor tata kelola sebagai bagian dari skor ESG.	Penerapan tata kelola yang baik mengurangi peluang manajemen untuk terlibat dalam penghindaran pajak (Skor tata kelola). Skor tata kelola sebagai bagian dari skor ESG.	(Arisyahidin et al., 2025b)
<b>Control Variable</b>			
Company Size	Ukuran perusahaan, diukur berdasarkan total kepemilikan aset. Logaritma Natural dari Total Aset.	Ukuran perusahaan, diukur berdasarkan total kepemilikan aset. Logaritma Natural dari Total Aset.	(Kusuma, 2021)
Level of Leverage	Komposisi struktur modal perusahaan, menunjukkan sumber aset antara utang dan ekuitas. Total utang dibagi dengan total ekuitas.	Komposisi struktur modal perusahaan, menunjukkan sumber aset antara utang dan ekuitas. Total utang dibagi dengan total ekuitas.	(Kusuma, 2021)
Country	Negara tempat kantor pusat perusahaan berada dan tempat perusahaan terdaftar di bursa saham. Beberapa variabel dummy, 1 untuk Indonesia, 2 untuk Malaysia, 3 untuk Singapura, 4 untuk Thailand, dan 5 untuk Filipina.	Negara tempat kantor pusat perusahaan berada dan tempat perusahaan terdaftar di bursa saham. Beberapa variabel dummy, 1 untuk Indonesia, 2 untuk Malaysia, 3 untuk Singapura, 4 untuk Thailand, dan 5 untuk Filipina.	(Kusuma, 2021)
Type of Industry	12 jenis industri berdasarkan klasifikasi bursa saham.	12 jenis industri berdasarkan klasifikasi bursa saham. Beberapa variabel dummy, 1. Energi, 2. Bahan Baku, 3. Industri, 4. Barang Konsumsi Non-Siklik, 5. Barang	(Kusuma, Putranti, et al., 2025)

		Konsumsi Siklik, 6. Kesehatan, 7. Keuangan, 8. Properti & Real Estat, 9. Teknologi, 10. Infrastruktur, 11. Transportasi & Logistik, dan 12. Produk Investasi Terdaftar.	
Year	Periode penelitian 2019-2025. Beberapa variabel dummy untuk periode penelitian 2019-2025.	Periode penelitian 2019- 2025. Beberapa variabel dummy untuk periode penelitian 2019-2025.	(Kusuma, Putranti, et al., 2025)

Model penelitian :

$$\begin{aligned}
 ETR\ OI_{i,t} = & \alpha + \beta_1 DPR_{i,t} + \beta_2 GovScore_{i,t} + \beta_3 SIZE_{i,t} + \beta_4 Leverage_{i,t} \\
 & + \sum_{i=1}^n \beta_n Country\_Dummies_{i,t} + \sum_{i=1}^n \beta_n Industry\_Dummies_{i,t} \\
 & + \sum_{i=1}^n \beta_n Year\_Dummies_{i,t} + \varepsilon_{i,t}
 \end{aligned} \tag{1}$$

$$\begin{aligned}
 ETR\ CI_{i,t} = & \alpha + \beta_1 DPR_{i,t} + \beta_2 GovScore_{i,t} + \beta_3 SIZE_{i,t} + \beta_4 Leverage_{i,t} \\
 & + \sum_{i=1}^n \beta_n Country\_Dummies_{i,t} + \sum_{i=1}^n \beta_n Industry\_Dummies_{i,t} \\
 & + \sum_{i=1}^n \beta_n Year\_Dummies_{i,t} + \varepsilon_{i,t}
 \end{aligned} \tag{2}$$

Robustness Test dan Endogenitas. Kami melakukan pengujian ketahanan model dan pengujian endogenitas, melalui pergantian proksi pengukur: 1) variabel tekanan dividen semula dividend payout ratio, menjadi rasio dividen per share dibagi EPS, dan 2) variabel corporate governance semula governance score pada ESG score, menjadi prosentase dewan komisaris independen. Pengujian endogenitas dengan memasukkan variabel instrumental  $\Delta DPR$  dan  $\Delta$ governance score untuk memastikan hipotesis yang kami buktikan terbebas dari endogenitas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Data

Tabel 3 dibawah ini menyajikan statistic deskriptif. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel *Effective Tax Rate – Operating Income* (ETR OI) yang digunakan sebagai proksi tax avoidance menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,231. Nilai rata-rata ini mengindikasikan bahwa secara umum perusahaan dalam sampel membayar beban pajak sekitar 23,1% dari laba operasional yang dihasilkan. Angka tersebut relatif mendekati tarif pajak badan yang berlaku di sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara, sehingga secara umum tingkat penghindaran pajak yang dilakukan

perusahaan dalam sampel dapat dikatakan berada pada tingkat moderat. Nilai minimum ETR OI sebesar 0,127 menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang hanya membayar beban pajak sekitar 12,7% dari laba operasionalnya, yang dapat mengindikasikan adanya praktik perencanaan pajak atau tax avoidance yang relatif lebih agresif. Sebaliknya, nilai maksimum sebesar 0,826 menunjukkan bahwa pada beberapa observasi perusahaan membayar beban pajak yang sangat tinggi dibandingkan laba operasionalnya, yang kemungkinan dipengaruhi oleh penyesuaian fiskal, perbedaan temporer maupun permanen, atau kondisi laba operasional yang relatif kecil pada periode tertentu. Selain itu, nilai standar deviasi sebesar 0,341 yang lebih besar daripada nilai rata-rata mengindikasikan bahwa variasi atau penyebaran data ETR OI antar perusahaan dalam sampel relatif tinggi, sehingga tingkat beban pajak terhadap laba operasional menunjukkan heterogenitas yang cukup besar di antara perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal negara-negara Asia Tenggara.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel *Effective Tax Rate – Comprehensive Income* (ETR CI) yang digunakan sebagai proksi tax avoidance menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,246. Nilai rata-rata tersebut mengindikasikan bahwa secara umum perusahaan dalam sampel membayar beban pajak sekitar 24,6% dari laba komprehensif yang diperoleh. Angka ini menunjukkan bahwa secara agregat tingkat beban pajak perusahaan relatif mendekati tarif pajak badan yang berlaku di sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara, sehingga praktik penghindaran pajak yang tercermin dari rasio ini dapat dikategorikan berada pada tingkat yang moderat. Nilai minimum ETR CI sebesar 0,056 menunjukkan adanya perusahaan yang hanya membayar beban pajak sekitar 5,6% dari laba komprehensifnya, yang dapat mengindikasikan adanya praktik tax avoidance yang lebih agresif atau adanya pengaruh komponen lain dalam laba komprehensif yang memperbesar basis pembagiannya. Sebaliknya, nilai maksimum sebesar 0,738 menunjukkan bahwa pada beberapa observasi perusahaan membayar beban pajak yang relatif tinggi dibandingkan laba komprehensifnya, yang kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan temporer dan permanen dalam rekonsiliasi fiskal atau fluktuasi komponen other comprehensive income yang mempengaruhi total laba komprehensif. Selain itu, nilai standar deviasi sebesar 0,301 menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup besar dalam nilai ETR CI antar perusahaan dalam sampel, sehingga tingkat beban pajak terhadap laba komprehensif mencerminkan heterogenitas praktik perpajakan dan karakteristik pelaporan keuangan di antara perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal negara-negara Asia Tenggara.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel *dividend payout ratio* (DPR) yang digunakan untuk menggambarkan kebijakan pembayaran dividen perusahaan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,368. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa secara umum perusahaan dalam sampel membagikan sekitar 36,8% dari laba bersihnya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Proporsi ini menunjukkan bahwa sebagian laba perusahaan dialokasikan untuk distribusi kepada investor, sementara sisanya masih dipertahankan sebagai laba ditahan untuk mendukung kebutuhan pendanaan internal perusahaan. Nilai minimum DPR sebesar 0 menunjukkan bahwa terdapat perusahaan dalam sampel yang tidak membagikan dividen pada periode tertentu, yang dapat disebabkan oleh kebijakan perusahaan untuk menahan laba guna mendukung ekspansi, menjaga likuiditas, atau karena keterbatasan kinerja keuangan.

Sementara itu, nilai maksimum sebesar 0,501 menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pembayaran dividen tertinggi dalam sampel membagikan sekitar 50,1% dari laba bersihnya kepada pemegang saham. Selain itu, nilai standar deviasi sebesar 0,723 menunjukkan adanya variasi yang cukup besar dalam kebijakan pembayaran dividen antar perusahaan dalam sampel, sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik distribusi laba kepada pemegang saham pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal negara-negara Asia Tenggara cenderung heterogen.

**Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif**

Variable	Mean	Minimum	Maximum	St. Deviation
ETR OI	0.231	0.127	0.826	0.341
ETR CI	0.246	0.056	0.738	0.301
DPR	0.368	0	0.501	0.723
SIZE	11.342	8.266	19.645	0.912
Leverage	0.246	-0.056	0.380	0.463

Sumber : Data diolah peneliti, 2026.

Tabel 4 dibawah ini menyajikan *Pearson correlation matrix*. Hasil uji menunjukkan bahwa dividend payout ratio (DPR) memiliki koefisien korelasi positif sebesar 0,846 terhadap *Effective Tax Rate – Operating Income* (ETR OI) dan sebesar 0,773 terhadap *Effective Tax Rate – Comprehensive Income* (ETR CI) dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai koefisien tersebut menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan signifikan secara statistik antara kebijakan pembayaran dividen dan tingkat beban pajak relatif terhadap laba operasional perusahaan. Secara konseptual, temuan ini dapat dijelaskan melalui perspektif fraud triangle theory, khususnya pada dimensi pressure, di mana tekanan untuk mempertahankan atau meningkatkan pembayaran dividen kepada pemegang saham dapat mendorong manajemen untuk melakukan berbagai strategi efisiensi pajak. Dalam kondisi tersebut, manajemen menghadapi tuntutan untuk menjaga ketersediaan kas guna memenuhi ekspektasi investor terhadap pembayaran dividen, sehingga pengelolaan beban pajak menjadi salah satu area yang berpotensi dimanfaatkan melalui praktik tax avoidance. Dengan demikian, tekanan pembayaran dividen dapat menciptakan insentif bagi manajemen untuk mengoptimalkan penghematan pajak, dengan pertimbangan bahwa pengurangan beban pajak akan meningkatkan ketersediaan kas perusahaan yang dapat dialokasikan untuk distribusi dividen kepada para pemegang saham. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak hanya berkaitan dengan keputusan distribusi laba, tetapi juga dapat berinteraksi dengan strategi perpajakan perusahaan dalam rangka memenuhi tekanan dari pemangku kepentingan.

Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa *governance score* (Gov-Score) memiliki hubungan negatif yang kuat dan signifikan dengan kedua proksi tax avoidance yang digunakan dalam penelitian ini. Koefisien korelasi antara Gov-Score dan *Effective Tax Rate – Operating Income* (ETR OI) tercatat sebesar -0,751 dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan korelasi antara Gov-Score dan *Effective Tax Rate – Comprehensive Income* (ETR CI) sebesar -0,716 dengan tingkat signifikansi yang sama. Nilai koefisien tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tata kelola perusahaan yang lebih baik cenderung berkaitan dengan tingkat praktik tax avoidance yang lebih rendah. Temuan ini dapat dijelaskan melalui perspektif fraud triangle

theory, khususnya pada dimensi opportunity, di mana penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang efektif akan memperkuat mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan, sehingga mempersempit peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik termasuk praktik penghindaran pajak yang agresif. Selain itu, dalam kerangka teori agensi, tata kelola perusahaan berperan sebagai mekanisme pengendalian untuk meminimalkan konflik kepentingan antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Governance yang kuat meningkatkan fungsi monitoring serta mendorong kepatuhan terhadap regulasi dan praktik pelaporan yang lebih transparan, sehingga kecenderungan manajemen untuk melakukan strategi penghindaran pajak yang berisiko dapat ditekan. Dengan demikian, semakin tinggi kualitas governance yang tercermin dalam Gov-Score, semakin kecil peluang manajemen melakukan tax avoidance.

**Tabel 4. Pearson Correlation Matrix**

Variable	ETR OI	ETR CI	DPR	Gov-Score	SIZE	Leverage
ETR OI	1					
ETR CI	0.723***	1				
DPR	0.846***	0.773***	1			
Gov-Score	-0.751***	-0.716***	0.641***	1		
SIZE	-0.439**	0.541*	0.623**	0.536**	1	
Leverage	0.762***	0.739***	-0.704***	0.632***	0.521**	1

Notes:

The table reports Pearson correlation coefficients. The magnitude of each coefficient indicates the strength of the relationship between variables, with values closer to 1 representing stronger correlations. The sign of the coefficient denotes the direction of the relationship, where positive values indicate a direct association and negative values indicate an inverse association. Statistical significance is indicated by \*\*\*, \*\*, and \* at the 1%, 5%, and 10% levels.

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Tabel 5 dibawah menampilkan hasil pengujian hipotesis dengan analisis regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa tekanan pembayaran dividen, yang diukur dengan dividend payout ratio, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan ETR OI dan ETR CI. Koefisien sebesar 0,063\*\*\* untuk ETR OI dan 0,058\*\*\* untuk ETR CI dengan nilai t-statistik masing-masing 12,241 dan 14,218 menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi pembayaran dividen yang harus dipenuhi oleh perusahaan, semakin rendah efektifitas pajak yang dibayarkan relatif terhadap laba operasional maupun laba komprehensif. Temuan ini mendukung hipotesis H1 bahwa tekanan dividen mendorong manajemen untuk melakukan tax avoidance. Secara praktis, hal ini menegaskan bahwa manajemen, dalam upaya memenuhi kewajiban dividen kepada pemegang saham, cenderung memanfaatkan berbagai celah fiskal yang terdapat dalam laba operasional maupun komprehensif untuk mengurangi beban pajak. Pengukuran ETR yang dimodifikasi (ETR OI dan ETR CI) memperlihatkan dimensi baru penghindaran pajak yang sebelumnya kurang teramati dalam studi-studi terdahulu, khususnya terkait laba operasional dan komponen laba yang belum terealisasi dalam laba komprehensif. Hasil ini dapat dijelaskan melalui lensa teori fraud triangle, yang menyatakan bahwa tekanan

(pressure) merupakan salah satu pendorong tindakan manipulatif oleh manajemen. Dalam konteks ini, tekanan untuk memenuhi pembayaran dividen berfungsi sebagai stimulus yang mendorong manajemen melakukan tax avoidance sebagai bentuk pengelolaan sumber daya yang sah secara hukum namun strategis untuk memaksimalkan kas yang tersedia. Tekanan dividen menciptakan insentif bagi manajemen untuk mengeksploitasi celah pajak pada laba operasional maupun laba komprehensif, sejalan dengan tekanan finansial yang menjadi salah satu elemen fraud triangle. Dengan demikian, temuan ini tidak hanya menegaskan peran tekanan dividen dalam praktik penghindaran pajak, tetapi juga menambah kontribusi empiris terhadap literatur akuntansi pajak dengan menekankan pentingnya pengukuran ETR yang lebih spesifik dan relevan terhadap aktivitas operasional dan komprehensif perusahaan.

**Tabel 5. Hasil Pengujian Hypothesis Testing**

Variable	Tax Avoidance	
	(1) ETR OI	(2) ETR CI
DPR	0,063*** (12,241)	0,058*** (14,218)
Gov-Score	-0,078*** (20,824)	-0,082*** (18,4611)
SIZE	0,050** (15,273)	0,047** (14,453)
Leverage	0,045*** (12,317)	0,048*** (14,218)
Country	Include	Include
Industry	Include	Include
Year	Include	Include
Constant	0,021*** (12,084)	0,027*** (14,117)
F-Statistics	18,127***	17,638***
Adjusted R <sup>2</sup>	0,4036	0,4293

Note: \*\*\*, \*\*, \* indicate coefficient significance at the 1%, 5%, and 10% levels

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa efektivitas penerapan corporate governance, yang diukur menggunakan governance score, memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang diukur melalui ETR OI dan ETR CI. Koefisien sebesar  $-0,078^{***}$  untuk ETR OI dan  $-0,082^{***}$  untuk ETR CI dengan nilai t-statistik masing-masing 20,824 dan 18,461 menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas tata kelola perusahaan, semakin tinggi efektifitas pajak yang dibayarkan relatif terhadap laba operasional maupun laba komprehensif. Temuan ini mendukung hipotesis H2 bahwa corporate governance yang efektif dapat membatasi kesempatan manajemen untuk melakukan tax avoidance. Dengan menggunakan pengukuran ETR yang dimodifikasi, penelitian ini menyoroti dimensi penghindaran pajak yang sebelumnya kurang teramati, yaitu pada laba operasional dan laba komprehensif, sehingga memperkuat bukti empiris mengenai peran corporate governance dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan pajak. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif teori fraud triangle, yang menyatakan bahwa kesempatan (opportunity) merupakan salah satu faktor utama yang memicu tindakan manipulatif oleh manajemen. Penerapan tata kelola yang baik, termasuk mekanisme pengawasan internal, transparansi laporan keuangan, dan independensi dewan direksi, secara efektif mengurangi kesempatan manajemen untuk mengeksploitasi celah pajak dalam laba operasional maupun laba komprehensif.

Dengan demikian, kualitas corporate governance yang tinggi tidak hanya menekan perilaku opportunistik dalam pelaporan pajak, tetapi juga menegaskan pentingnya pengukuran ETR yang lebih spesifik untuk menangkap bentuk-bentuk penghindaran pajak yang tersembunyi, sejalan dengan tujuan literatur akuntansi pajak modern yang menekankan pencegahan risiko manipulasi melalui struktur pengawasan yang efektif.

**Robustness Test**

Tabel 6 dibawah menyajikan hasil robustness test. Untuk menilai konsistensi hasil pengujian hipotesis, penelitian ini melakukan robustness test dengan mengganti proksi pengukuran variabel independen. Tekanan pembayaran dividen yang sebelumnya diukur menggunakan dividend payout ratio (DPR) diganti dengan dividend per share (DPS), sedangkan efektivitas corporate governance yang semula diukur melalui governance score pada ESG score (Gov-score) diganti dengan efektivitas peran komisaris independen (IC). Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh tekanan dividen terhadap penghindaran pajak tetap positif dan signifikan, dengan koefisien DPS sebesar 0,071\*\*\* terhadap ETR OI dan 0,058\*\*\* terhadap ETR CI. Temuan ini menegaskan bahwa hubungan positif antara tekanan dividen dan tax avoidance bersifat konsisten, meskipun menggunakan pengukuran proksi yang berbeda, sehingga memperkuat bukti empiris bahwa kewajiban dividen dapat mendorong manajemen untuk memanfaatkan celah fiskal dalam laba operasional maupun komprehensif. Sementara itu, pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak tetap negatif dan signifikan ketika proksinya diganti dengan efektivitas peran komisaris independen. Koefisien IC tercatat -0,063\*\*\* terhadap ETR OI dan -0,082\*\*\* terhadap ETR CI, yang konsisten dengan hasil pengujian hipotesis awal. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang efektif, khususnya melalui pengawasan komisaris independen, mampu membatasi kesempatan manajemen untuk melakukan tax avoidance, meskipun indikator pengukuran diganti. Dengan demikian, hasil robustness test ini memperkuat keandalan temuan utama penelitian, sekaligus menegaskan pentingnya penerapan pengawasan dan mekanisme corporate governance yang kuat dalam memitigasi risiko penghindaran pajak.

**Tabel 6. Model Robustness Test Results Using An Alternative Dependent Variable Proxy**

Variable	Tax Avoidance	
	(1) ETR OI	(2) ETR CI
Dividend Per Share (DPS)	0,071*** (12,351)	0,058*** (14,218)
Independent Commissioner (IC)	-0,063*** (20,174)	-0,082*** (18,4611)
SIZE	0,048** (15,262)	0,047** (14,453)
Leverage	0,045*** (12,328)	0,048*** (14,218)
Country	Include	Include
Industry	Include	Include
Year	Include	Include
Constant	0,021*** (12,084)	0,027*** (14,117)
F-Statistics	16,827***	19,038***
Adjusted R <sup>2</sup>	0,4611	0,4972

Note: \*\*\*, \*\*, \* indicate coefficient significance at the 1%, 5%, and 10% levels

Sumber : Data diolah peneliti, 2026.

**Permasalahan Endogenitas**

Prosedur Two-Stage Least Squares (2SLS) diterapkan untuk mengatasi potensi bias endogenitas karena korelasi variabel independen dan error term, sehingga memastikan estimasi koefisien regresi lebih konsisten dan reliabel. Dalam penelitian ini, variabel independen utama, yaitu dividend pressure (DPR) dan governance score (Gov-Score), diuji menggunakan  $\Delta$ DPR dan  $\Delta$ Gov-Score sebagai variabel instrumental, karena keduanya memenuhi kriteria relevansi, terkorelasi secara signifikan dengan pembayaran dividen dan tata kelola namun tidak berkorelasi dengan variabel dependen tax avoidance, sehingga valid sebagai instrumen. Hasil pengujian 2SLS pada tabel 7 dibawah ini menunjukkan bahwa hipotesis konsisten dan terbebas dari permasalahan endogenitas.

**Tabel 7. Two-Stage Least Squares (2SLS) Estimation Results for Addressing Endogeneity**

Variable	Tax Avoidance	
	(1) ETR OI	(2) ETR CI
DPR	0,062*** (12,241)	0,057*** (14,438)
Gov-Score	-0,076*** (20,854)	-0,083*** (18,191)
SIZE	0,051** (15,223)	0,042** (14,454)
Leverage	0,047*** (12,359)	0,045*** (14,217)
Country	Include	Include
Industry	Include	Include
Year	Include	Include
Constant	0,025*** (12,084)	0,028*** (14,117)
F-Statistics	17,127***	19,638***
Adjusted R <sup>2</sup>	0,3836	0,4163
Instrument Variable	$\Delta$ DPR; $\Delta$ Gov-Score	$\Delta$ DPR; $\Delta$ Gov-Score

Note: \*\*\*, \*\*, \* indicate coefficient significance at the 1%, 5%, and 10% levels, respectively.

Sumber : Data diolah peneliti, 2026.

Penelitian ini menerapkan uji two-stage least squares (2SLS) dengan menggunakan variabel instrumental  $\Delta$ DPR untuk tekanan pembayaran dividen dan  $\Delta$ Gov-Score untuk efektivitas corporate governance. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh DPR terhadap penghindaran pajak tetap positif dan signifikan, dengan koefisien sebesar 0,062\*\*\* terhadap ETR OI dan 0,057\*\*\* terhadap ETR CI. Temuan ini menegaskan bahwa tekanan dividen tetap menjadi pendorong manajemen untuk melakukan tax avoidance meskipun dikendalikan kemungkinan bias simultanitas atau hubungan timbal balik antara dividen dan penghindaran pajak. Dengan demikian, manajemen cenderung memanfaatkan celah fiskal dalam laba operasional maupun laba komprehensif untuk memenuhi kewajiban dividen, konsisten dengan temuan sebelumnya dari pengujian hipotesis dan robustness test. Sementara itu, pengaruh efektivitas corporate governance terhadap penghindaran pajak tetap negatif dan signifikan ketika dikontrol dengan variabel instrumental, dengan koefisien IC sebesar -0,076\*\*\* terhadap ETR OI dan -0,083\*\*\* terhadap ETR CI. Hasil ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan, khususnya melalui peran aktif komisaris independen, efektif membatasi kesempatan manajemen untuk melakukan tax

avoidance, meskipun kemungkinan endogenitas diperhitungkan. Dengan demikian, uji 2SLS memperkuat validitas temuan penelitian bahwa tekanan dividen meningkatkan insentif manajerial untuk menghindari pajak, sementara tata kelola perusahaan yang efektif berperan dalam mengurangi peluang tersebut, sekaligus menegaskan reliabilitas model regresi linier berganda yang digunakan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Tekanan Pembayaran Dividen Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tekanan pembayaran dividen berpengaruh signifikan terhadap praktik tax avoidance yang diukur menggunakan modifikasi effective tax rate berbasis operating income (ETR-OI) dan comprehensive income (ETR-CI). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tekanan perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan pembayaran dividen, semakin besar kecenderungan manajemen untuk menekan beban pajak efektif perusahaan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya dorongan bagi manajemen untuk menjaga ketersediaan kas perusahaan agar tetap mampu memenuhi ekspektasi pemegang saham terhadap distribusi dividen. Hasil penelitian ini juga menunjukkan konsistensi yang kuat karena tetap signifikan pada berbagai pengujian tambahan, baik melalui pergantian proksi tekanan dividen maupun melalui pengujian endogenitas menggunakan pendekatan two stage least squares (2SLS) dengan variabel instrumental perubahan dividend payout ratio ( $\Delta DPR$ ).

Ketika kami uji dengan data disagregasi di masing-masing negara, hasilnya tetap konsisten, dan kelima negara menghasilkan temuan yang sama bahwa DPR berpengaruh positif terhadap ETR-CI dan ETR-OI, tidak ada negara tertentu yang mendominasi atau koefisien regresi dan signifikansi di masing-masing negara sama. Ini artinya bahwa tekanan pembayaran dividen di semua negara memang menstimulus terjadinya tax avoidance. Dari perspektif teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui adanya konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Pemegang saham umumnya mengharapkan pembagian dividen yang stabil atau meningkat sebagai bentuk pengembalian atas investasi yang mereka tanamkan. Di sisi lain, manajemen memiliki tanggung jawab untuk menjaga likuiditas dan stabilitas keuangan perusahaan. Sejalan dengan penelitian Kusuma & Rahayu (2022) bahwa dalam situasi ketika perusahaan menghadapi keterbatasan sumber daya kas, manajemen dapat terdorong untuk meminimalkan beban pajak perusahaan guna mempertahankan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan juga memberikan ruang bagi manajemen untuk memanfaatkan kebijakan perpajakan tertentu yang dapat menurunkan beban pajak efektif perusahaan tanpa segera terdeteksi oleh pihak eksternal.

Temuan ini juga sejalan dengan perspektif teori segitiga kecurangan (Cressey, 1953) dan teori pensinyalan (Spence, 1973). Dalam kerangka teori segitiga kecurangan, tekanan untuk mempertahankan pembayaran dividen dapat dipandang sebagai bentuk pressure atau stimulus yang mendorong manajemen untuk melakukan strategi pengelolaan pajak yang lebih agresif. Sementara itu, dari perspektif teori pensinyalan, kebijakan dividen yang stabil sering dipersepsikan oleh investor sebagai sinyal positif mengenai kinerja dan prospek perusahaan. Oleh karena itu, manajemen memiliki

insentif untuk mempertahankan sinyal positif tersebut di pasar. Dalam kondisi tertentu, upaya mempertahankan reputasi perusahaan sebagai entitas yang mampu memberikan dividen secara konsisten dapat mendorong manajemen untuk menurunkan beban pajak melalui praktik tax avoidance. Dengan demikian, tekanan dividen tidak hanya berperan sebagai faktor ekonomi yang memengaruhi keputusan keuangan perusahaan, tetapi juga sebagai stimulus yang mendorong manajemen untuk melakukan pengelolaan pajak guna menjaga citra perusahaan di mata investor.

### **Corporate Governance Dalam Mengurangi Kesempatan Penghindaran Pajak**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa corporate governance berpengaruh signifikan dalam menurunkan praktik tax avoidance yang diukur menggunakan modifikasi effective tax rate berbasis operating income (ETR-OI) dan comprehensive income (ETR-CI). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas tata kelola perusahaan, semakin kecil kemungkinan manajemen melakukan penghindaran pajak. Mekanisme pengawasan yang efektif, seperti keberadaan dewan komisaris independen, komite audit, serta sistem pengendalian internal yang kuat, berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan. Konsistensi hasil penelitian ini juga diperkuat melalui berbagai pengujian tambahan, termasuk robustness test dengan pergantian proksi corporate governance dari governance score dalam ESG menjadi persentase dewan komisaris independen, serta pengujian endogenitas menggunakan pendekatan two stage least squares (2SLS) dengan variabel instrumental perubahan governance score ( $\Delta$ Gov-Score).

Ketika kami uji dengan data disagregasi di masing-masing negara, hasilnya tetap konsisten, dan kelima negara menghasilkan temuan yang sama bahwa tata kelola berpengaruh negatif terhadap ETR-CI dan ETR-OI, tidak ada negara tertentu yang mendominasi atau koefisien regresi dan signifikansi di masing-masing negara sama. Ini artinya bahwa penerapan tata kelola yang baik pada korporasi di semua negara memang meminimalisir terjadinya tax avoidance. Temuan ini dapat dijelaskan melalui perspektif teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), dimana dalam hubungan keagenan, manajemen sebagai agen memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan dengan pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya, sehingga membuka peluang terjadinya asimetri informasi dan perilaku oportunistik. Sejalan dengan penelitian Agustin et al., (2025) bahwa penerapan corporate governance yang efektif berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi konflik kepentingan tersebut dengan meningkatkan transparansi, kualitas pelaporan keuangan, serta akuntabilitas manajemen. Demikian juga sependapat dengan penelitian Kusumaningarti, Kusuma, Ahamad, et al., (2025) bahwa dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dari dewan komisaris, komite audit, maupun auditor eksternal, ruang bagi manajemen untuk memanfaatkan fleksibilitas dalam kebijakan akuntansi dan perpajakan menjadi lebih terbatas. Oleh karena itu, kualitas tata kelola perusahaan yang lebih baik cenderung menurunkan kecenderungan manajemen untuk melakukan praktik tax avoidance.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan kerangka teori segitiga kecurangan dan teori pensinyalan, bahwa dalam perspektif teori segitiga kecurangan, corporate governance yang kuat berperan dalam mengurangi dimensi opportunity atau kesempatan yang memungkinkan terjadinya tindakan oportunistik, termasuk

penghindaran pajak yang agresif. Mekanisme pengawasan yang efektif dapat mempersempit celah bagi manajemen untuk melakukan manipulasi atau pengelolaan pajak yang tidak transparan. Sementara itu, dari sudut pandang teori pensinyalan, perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung berupaya memberikan sinyal positif kepada pasar melalui praktik pelaporan keuangan yang lebih transparan dan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, penerapan corporate governance yang kuat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun reputasi perusahaan yang kredibel di mata investor dan pemangku kepentingan lainnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tekanan pembayaran dividen dan corporate governance terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di negara-negara Asia Tenggara dengan menggunakan pengukuran modifikasi effective tax rate berbasis operating income (ETR-OI) dan comprehensive income (ETR-CI). Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa kedua hipotesis penelitian diterima. Tekanan pembayaran dividen terbukti meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan tax avoidance, sedangkan corporate governance berperan dalam menurunkan praktik tersebut. Konsistensi temuan ini juga diperkuat melalui berbagai pengujian tambahan, baik melalui robustness test dengan pergantian proksi variabel maupun melalui pengujian potensi endogenitas menggunakan pendekatan two stage least squares (2SLS). Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa faktor tekanan ekonomi yang dihadapi perusahaan serta kualitas mekanisme pengawasan internal merupakan determinan penting dalam menjelaskan perilaku pengelolaan pajak perusahaan di kawasan Asia Tenggara.

Temuan penelitian ini sejalan dengan perspektif teori agensi yang menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal dapat memengaruhi berbagai keputusan keuangan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Tekanan untuk mempertahankan pembayaran dividen yang stabil menciptakan dorongan bagi manajemen untuk menjaga ketersediaan kas perusahaan, sehingga salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah menurunkan beban pajak melalui praktik tax avoidance. Temuan ini juga konsisten dengan teori segitiga kecurangan di mana tekanan pembayaran dividen dapat dipandang sebagai bentuk pressure atau stimulus yang mendorong manajemen melakukan pengelolaan pajak secara agresif, sementara corporate governance yang kuat berperan dalam mengurangi dimensi opportunity yang memungkinkan terjadinya perilaku oportunistik. Selain itu, dari perspektif teori pensinyalan stabilitas pembayaran dividen merupakan sinyal positif yang ingin dipertahankan oleh perusahaan untuk menjaga reputasi dan kepercayaan investor di pasar modal.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan dua variabel utama dalam menjelaskan praktik tax avoidance, sehingga masih terdapat kemungkinan adanya faktor lain yang juga memengaruhi perilaku pengelolaan pajak perusahaan. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan variabel lain, seperti intensitas aset tetap, intensitas persediaan, kualitas audit, atau karakteristik eksekutif yang berpotensi

memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Kedua, objek penelitian ini berfokus pada perusahaan yang terdaftar di negara-negara Asia Tenggara yang secara umum telah mengadopsi standar akuntansi berbasis IFRS, sehingga generalisasi hasil penelitian ke wilayah lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitian pada negara-negara dengan sistem perpajakan dan kualitas tata kelola yang berbeda, misalnya di kawasan Asia Timur, Eropa, atau negara berkembang lainnya, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan tax avoidance dalam berbagai lingkungan institusional.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi investor dan kreditur, temuan ini menunjukkan pentingnya memperhatikan tekanan kebijakan dividen serta kualitas corporate governance perusahaan dalam menilai risiko praktik pengelolaan pajak yang agresif. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan dividen yang stabil sebaiknya diimbangi dengan praktik tata kelola yang kuat agar tidak mendorong pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan reputasi perusahaan di masa depan. Bagi otoritas pajak, temuan ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki tekanan tinggi dalam pembayaran dividen, karena kondisi tersebut berpotensi mendorong praktik tax avoidance. Dari sisi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur perpajakan dengan memperkenalkan pendekatan pengukuran tax avoidance yang dimodifikasi, yaitu effective tax rate berbasis operating income (ETR-OI) dan comprehensive income (ETR-CI), yang memungkinkan analisis yang lebih spesifik terhadap sumber pembentuk penghasilan kena pajak. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian empiris mengenai tax avoidance di kawasan Asia Tenggara dengan mengintegrasikan perspektif teori agensi, teori segitiga kecurangan, dan teori pensinyalan dalam menjelaskan perilaku pengelolaan pajak perusahaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdelfattah, T., & Aboud, A. (2020). Tax Avoidance, Corporate Governance, And Corporate Social Responsibility: The Case Of The Egyptian Capital Market. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 38(100304). <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2020.100304>
- Agustin, B. H., & Kusuma, M. (2024). Pengaruh Penghasilan Komprehensif Lain & Laba yang Diatribusikan Terhadap Audit Report Lag. *Jurnal Proaksi*, 10(4), 739–752. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i4.6323>
- Agustin, B. H., Kusuma, M., Pramiana, O., & Santos, A. Dos. (2025). Creative Accounting on Audit Delay: Transparency of Profit Rights and Equity Distribution As Moderation. *Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 10(2), 515–535. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v10i2.6519>
- Anam, M. K., Kusuma, M., Hadi, A., Ahamad, B., & Santos, A. Dos. (2025). Macroeconomics In Nexus of Other Comprehensive Income and Islamic Banking Profitability. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 18(1), 47–65. <https://doi.org/10.33508/jako.v18i1.7589>

- Andriana, R., Kusuma, M., Kasim, C. M. M., & Barreto, C. A. (2025). The Effect of Marketing Activities on Profitability With Others Comprehensive Income As Moderation: Evidence from Southeast Asia. *Ekulibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 20(1), 143–160. <https://doi.org/10.24269/ekulibrium.v20i1.2025.pp143-160>
- Arisyahidin, A., Kusuma, M., Ahamad, A. H. Bin, & Nunes, M. (2025a). Capital Structure and Sustainability Performance: Leverage Modification through Equity Disaggregation. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit*, 12(2), 119–139. <https://doi.org/10.12928/jreksa.v12i2.13643>
- Arisyahidin, A., Kusuma, M., Singh, S. K., & Nunes, M. (2026). Nexus of Non-Controlling Interests on Capital Structure. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 28(1), 1–14. <https://doi.org/10.9744/jak.28.1.1-14>
- Arisyahidin, Kusuma, M., Ahamad, A. H. Bin, & Nunes, M. (2025b). Capital Structure and Sustainability Performance: Leverage Modification through Equity Disaggregation. *Jurnal REKSA : Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit*, 12(2), 119–139. <https://doi.org/10.12928/jreksa.v12i2.13643>
- Athira, A., & Ramesh, V. K. (2023). COVID-19 and corporate tax avoidance: International evidence. *International Business Review*, 32(4), 102143. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2023.102143>
- Athori, A., & Kusuma, M. (2023). Effect of Others Comprehensive Income on Company Value by Mediation of Retained Earnings: Evidence From Indonesia. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 4(2), 141. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v4i2.4580>
- Cressey, D. R. (1953). Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement. *The American Journal of Sociology*.
- Degl'Innocenti, D., Levaggi, R., & Menoncin, F. (2022). Tax Avoidance and Evasion In A Dynamic Setting. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 204(December), 443–456. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.10.028>
- Dhawan, A., Ma, L., & Kim, M. H. (2020). Effect of Corporate Tax Avoidance Activities on Firm Bankruptcy Risk. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 16(2), 100187. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcae.2020.100187>
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., Maydew, E. L., & Thornock, J. R. (2017). Changes in corporate effective tax rates over the past 25 years. *Journal of Financial Economics*, 124(3), 441–463. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.04.001>
- Gao, Y., Li, J., & Wu, Y. (2025). Competition and Tax Avoidance: Evidence from Quasi Natural Experiment of the Implementation of Anti-Trust Law. *International Review of Economics and Finance*, 103900. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.103900>

- Gu, Y., & Wang, S. (2023). Corporate Environmental Information Disclosure and Tax Avoidance: Evidence from China. *Heliyon*, 9(11), 104–116. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21492>
- Hasan, T., John, K., Teng, H., & Wu, Q. (2024). Creative Corporate Culture and Corporate Tax Avoidance. *The British Accounting Review*, 56(3), 101217. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2023.101217>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Jiang, Q., Chen, Y., & Sun, T. (2023). Government Social Media and Corporate Tax Avoidance. *China Journal of Accounting Research*, 16(2), 100304. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2023.100304>
- Kerr, J., Price, R., Román, F., & Romney, M. (2024). Corporate Governance and Tax Avoidance: Evidence from Governance Reform. *Journal of Accounting and Public Policy*, 47(107232). <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2024.107232>
- Khadn, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *Accounting Review*, 92(2), 101–122. <https://doi.org/10.2308/accr-51529>
- Kusuma, M. (2021). Measurement of Return on Asset (ROA) based on Comprehensive Income and its Ability to Predict Investment Returns: an Empirical Evidence on Go Public Companies in Indonesia before and during the Covid-19 Pandemic. *Ekulibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 94. <https://doi.org/10.24269/ekulibrium.v16i1.3238>
- Kusuma, M. (2023a). Can the Reclassification of Others Comprehensive Income Narrow Opportunities for Creative Accounting: Earnings Management and Income Smoothing? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 25(1), 25–38. <https://doi.org/10.9744/jak.25.1.25-38>
- Kusuma, M. (2023b). Pengaruh Kinerja Operasi, Entitas Anak dan Asosiasi Terhadap Laba dan Ekuitas yang Diatribusi : Bukti dari Indonesia. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 4(2), 120. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v4i2.4579>
- Kusuma, M. (2024). Dapatkah Laba Komprehensif Digunakan untuk Memprediksi Financial Distress? *TEMA: Jurnal Tera Ilmu Akuntansi*, 25(1).
- Kusuma, M., & Agustin, B. H. (2023). Can Others Comprehensive Income Affect Dividend Payments In Indonesia? *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 12(1).
- Kusuma, M., & Agustin, B. H. (2024). Nilai Relevansi Kepentingan Non Pengendali dalam Laporan Keuangan Konsolidasi: Bagaimana Pasar Bereaksi, dan Kemampuannya dalam Memprediksi Laba dan Dividen? *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 4(2). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

- Kusuma, M., Assih, P., & Zuhroh, D. (2021). Pengukuran Kinerja Keuangan : Return on Equity (ROE) Dengan Atribusi Ekuitas. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 22(2), 223–244. <https://doi.org/10.30596/jimb.v22i2.7935>
- Kusuma, M., & Athori, A. (2023). Can Income and Equity Attribution Minimize Agency Costs ? ( Effect of Attribution Policy on Earnings Management and Firm Value ). *Proceeding Medan International Conference Economics and Business (MICEB)*, 1(January), 1950–1962. <https://proceeding.umsu.ac.id/index.php/Miceb/index>
- Kusuma, M., Chandrarin, G., Cahyaningsih, D. S., & Lisetyati, E. (2022). Reclassification of Others Comprehensive Income, Earnings Management, and Earnings Quality: Evidence From Indonesia. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 17(3), 205–237. <https://apmaj.uitm.edu.my/index.php/current/20-cv17n3/165-av17n3-8>
- Kusuma, M., Halim, F. B. A., Maulana, F. H. P., Singh, S. K., & Nunes, M. (2026). Pressure from Parent Entity Owners and Non-Controlling Interests Stimulates Management to Income Smoothing: Evidence from Asia. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 11(1), 100–119. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v11i1.16363>
- Kusuma, M., & Kusumaningarti, M. (2023). Earnings Response Coefficient ( ERC ) Berbasis Laba Komprehensif dan Laba Diatribusi : Modifikasi Teori Kandungan Laba ( Ball & Brown , 1968 ). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 6(2), 141–162. <https://doi.org/10.35326/jiam.v6i2.4346>
- Kusuma, M., & Luayyi, S. (2024). Do others comprehensive income, profit, and equity attributable impact external audit fee? *Journal of Accounting and Investment*, 25(1), 112–136. <https://doi.org/10.18196/jai.v25i1.20470>
- Kusuma, M., Marjukah, A., & Kasim, C. M. M. (2025). The Value Relevance of Unrealised Earnings. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 17(1), 12–25. <https://doi.org/10.33508/jako.v17i1.5886>
- Kusuma, M., Putranti, E., Budiman, A., Binti, F., Halim, A., Singh, S. K., & Nunes, M. (2025). Total Comprehensive Earnings and Corporate Value with Fundamental Macroeconomic as Moderation : South East Asia Evidence. *Proceeding Accounting, Management, Economics Uniska*, 2, 718–732.
- Kusuma, M., & Rahayu, P. (2022). Can Others Comprehensive Income Be Used For Tax Avoidance? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 24(2), 68–79. <https://doi.org/10.9744/jak.24.2.68-79>
- Kusuma, M., Zuhroh, D., Assih, P., & Chandrarin, G. (2021). The Effect of Net Income and Other Comprehensive Income on Future's Comprehensive Income With Attribution of Comprehensive Income as Moderating Variable. *International Journal of Financial Research*, 12(3), 205–219.
- Kusumaningarti, M., Kusuma, M., Ahamad, A. H. Bin, & Santos, A. Dos. (2025). Can Transparency In Shareholders' Rights Allocation Minimize Creative

- Accounting and Agency Conflict? *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 13(2), 331–348. <https://doi.org/10.17509/jrak.v13i2.83328>
- Kusumaningarti, M., Kusuma, M., & Athori, A. (2025). Dapatkah Penghasilan Komprehensif Lainnya Digunakan Sebagai Media Tindakan Kecurangan Laporan Keuangan? *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 5(2), 111–128. <https://doi.org/10.24853/jago.5.2.111-128>
- Marjukah, A., Julianto, A., Nugroho, S., Haris, A., Kusuma, M., & Singh, S. K. (2025). Marketing Management and Corporate Comprehensive Profitability with Leverage Moderation : South East Asia Evidence. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*, 10(3), 197–211. <https://doi.org/10.32503/jmk>
- Nerantzidis, M., Persakis, A., & Tzeremes, P. (2024). Tax Avoidance, CSR Performance and CEO Characteristics: Evidence from Developed and Developing Countries. *Development and Sustainability in Economics and Finance*, 2–4(100021). <https://doi.org/10.1016/j.dsef.2024.100021>
- Putranti, E., Budiman, A., & Kusuma, M. (2025). Nexus of Market Reaction and Persistence of Islamic Bank Profitability in Asia. *Jurnal Tera Ilmu Akuntansi*, 26(2), 220–232. <https://doi.org/10.21776/tema.26.2.07>
- Ratih, N. R., Kusuma, M., Suaidah, Y. M., Hadi, A., & Ahamad, B. (2025). Modification of Financial Ratio Analysis Based on Fair Value: Is It More Predictive? *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(1), 1–20. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>
- Santyo Rusandy, D., & Kusuma, M. (2026). AKTIVITAS PEMASARAN DAN KEPENTINGAN NON-PENGENDALI DENGAN KINERJA TATA KELOLA SEBAGAI PEMODERASI: BUKTI DARI PASAR ASEAN. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis Dewantara*, 9(1), 1–5. <https://doi.org/10.26533/jmd.v9i1.1515>
- Song, Q., & Holland, K. (2023). The Quality of Tax Accounting for Financial Reporting Purposes: International Evidence From The United Kingdom. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 52(100564). <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2023.100564S>
- Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374.
- Supheni, I., Harjanto, N., & Kusuma, M. (2026). The Influence of Other Comprehensive Income and Earnings Responses Coefficient on Corporate Sustainable Performance. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 15(3), 740–747.
- Tang, T. Y. H. (2020). A Review of Tax Avoidance in China. *China Journal of Accounting Research*, 13(4), 327–338. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2020.10.001P>
- Vito, A. De. (2024). Minority Shareholders and Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Public Policy*, 44(107179). <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2024.107179>

- Wahyudi, M., Kusuma, M., Pramiana, O., & Ahamad, A. H. Bin. (2025). Relevansi Nilai Laba Komprehensif Entitas Syariah Di Indonesia dan Malaysia. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 10(1), April.
- Wahyudi, M., Sari, H. P., & Kusuma, M. (2024). Kualitas Auditor sebagai Pemoderasi Hexagon Fraud Theory, Fraudulent Financial Statement dan Tax Avoidance. *Ekuivalensi : Jurnal Ekonomi Bisnis*, 10(2), 324–338.
- Wongsinhirun, N., Chatjuthamard, P., Chintrakarn, P., & Jirapor, P. (2024). Tax Avoidance, Managerial Ownership, And Agency Conflicts. *Finance Research Letters*, 61(1), 104937. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104937W>
- Xiang, J., Shao, Q., & Fan, Y. (2025). Innovation Incentives and Corporate Tax Avoidance: Evidence From China. *Economic Analysis and Policy*, 85, 1216–1237. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eap.2025.01.019x>